# BAB I

# PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan terkait dengan latar balakang masalah yang ada dilapangan yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

## A. Latar Belakang

Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan manusia serta membuat manusia memiliki eksistensi yang lebih bermartabat. Pendidikan formal pada hakikatnya merupakan suatu proses perpanjangan tangan keluarga untuk mendewasakan anak, sehingga dapat hidup layak di tengah-tengah masyarakat. "Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia, sehingga memungkinkan dimensi kemanusiaan yang melekat pada setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal".(Renstra Depdiknas, 2005:10) Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai (Renstra Depdiknas, 2005:10).

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, secara terperinci dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bab II Pasal 3, bahwa:

> Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan umum penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

> Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil / Insan Paripurna), yaitu insan yang cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. (Renstra Depdiknas, 2005:10).

Pembangunan pendidikan perlu diupayakan, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat mencapai insan Indonesia yang cerdas komprehensif dan kompetitif. Pendidikan dipandang sebagai wahana strategis dalam membangun kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual dan kinestetis. Meliono dalam Tilaar (2011:59) menegaskan bahwa “pendidikan menjadi sangat penting bagi setiap generasi yang hidup di negara manapun, tidak terkecuali di Indonesia” dalam hal ini melalui pendidikan dengan program yang beragam yang ditawarkan kepada

masyarakat, maka setiap negara khususnya di Indonesia akan memiliki undang-undang, kebijakan dan peraturan yang terkait.

Hal lain yang penting adalah unsur yang menunjang proses pendidikan itu sendiri, para pelaku di bidang pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik, pemerintah, organisasi pendidikan yang cakupannya sangat luas yang dengan sistem pendidikan tersebut akan memperlihatkan peran, fungsi, tujuan dan kebutuhan masing-masing unsur. Pendidikan akan berhasil baik sesuai dengan yang diinginkan dan akan tergantung bagaimana masing-masing unsur itu berinteraksi secara holistik sesuai harapan yang diinginkan.

Sejalan dengan era globalisasi, isu demokrasi sangat deras masuk ke penjuru dunia termasuk Indonesia, bahkan demokrasi menjadi bahan yang menarik untuk dikaji di berbagai kesempatan, baik pertemuan ilmiah maupun kajian dalam mass media. Namun implementasi demokrasi yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat belum dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Sejak berdirinya Negara ini, para *founding father* telah sepakat memilih demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia seperti yang tersurat dalam dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam perjalanannya demokrasi ini seringkali berganti sistem dalam berdemokrasi, mulai dari demokrasi parlementer, terpimpin dan demokrasi Pancasila, pergantian sistem demokrasi ini seringkali mengundang sikap kritis rakyat Indonesia pada sistem yang dijalankan. Sikap kritis yang muncul karena perasaan tidak puas dari sebagian besar masyarakat Indonesia.

Fenomena lain dari perjalanan demokrasi di Indonesia ternyata dari setiap sikap kritis yang dilontarkan oleh masyarakat ternyata masih jauh dari sikap kritis yang seharusnya dibangun dari nilai-nilai demokrasi dan kedamaian. Kita tengok tahun 1965 terjadinya revolusi mengakibatkan pertumpahan darah dan kekerasan dimana-mana. Demokrasi yang diungkapkan Mudji (2000:45) bahwa :

> Iklim budaya demokratis ditandai dengan adanya para warga yang hidup berdampingan secara damai, kreatif dan dapat menjalankan hak kontrol terhadap negaranya. Sehingga pembenahan tujuan reformasi harus segera dilakukan. Salah satu agenda reformasi yang akan dibangun bangsa Indonesia adalah menentang segala bentuk penyimpangan demokrasi seperti kediktatoran baik bersifat langsung maupun tidak langsung, feodalisme meupun totaliterisme sehingga tercipta suatu tatanan demokrasi yang sehat dan kuat.

Dari rangkaian peristiwa itu ternyata demokrasi yang dibangun bengsa ini telah menjerumuskan munculnya konflik-konflik yang menghancurkan sistem sehingga tatanan yang sudah ada menjadi rusak dan sirna dan kita memulai lagi sistemnya dari nol. Padahal Surbakti (1992:228) mengemukakan: “Demokrasi hanya mentolelir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Untuk itu sistem demokrasi, menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk consensus”.

Guna menjembatani antar sikap kritis yang masih jauh dari tatanan kehidupan yang damai yang disyaratkan demokrasi, pendidikan menjadi hal yang penting. Oleh karena dalam tujuan Pendidikan Nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengungkapkan cita-cita luhur pendidikan yakni Pendidikan

merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan kepribadian dapat dibina, ditingkatkan harkat, derajata martabat dari nilai kemanusiaannya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yakni manusia yang memiliki keseimbangann antara ilmu pengetahuan teknologi dan keimanan serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, cerdas, kritis, terampil, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, cinta tanah air dan mampu menerapkan dalam kehidupannya.

Tujuan Pendidikan Nasional yang dijabarkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengharapkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam sikap kritis dalam kehidupan berdemokrasi. Keterampilan dan kemampuan sikap kritis siswa dalam pembelajaran demokrasi ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini dunia pendidikan diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memenuhi tuntutan tersebut yakni menghasilkan generasi penerus bangsa yang melek dan mampu bersikap kritis tetapi dalam tatanan memelihara budaya dan nilai-nilai kedamaian, kekeluargaan, dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era demokratisasi ini.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting dalam mengatasi hal tersebut di atas dalam membina sikap kritis siswa dalam tatanan demokrasi dan untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi yang diperlukan dalam penegakan hukum. PKn dengan karakteristik konsepnya yang abstrak, kompleks dan simbolik,

diharapkan dapat dijadikan wahana yang potensial untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa yang berkualitas dalam hidup berdemokrasi.

Akan tetapi, konsep PKn seperti yang diharapkan di atas belum dapat menjawab dengan maksimal. Hal ini ditandai bahwa pendidikan PKn belum bisa menjembatani antara kesadaran masyarakat dalam berkehidupan demokrasi dengan penuh kedamaian.

Dari uraian di atas maka pemmbelajaran demokrasi dalam menumbuhkan sikap kritis siswa menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti apalagi dikaji lewat studi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun tentang demokrasi ini sudah banyak diteliti oleh orang lain, penulis mencoba untuk mencari sesuatu hal lain dalam kajian demokrasi ini, apalagi penulis mengkaji sikap kritis siswa SMA Pasundan 3 Cimahi yang merupakan sekolah swasta yang sudah mempunyai nama yang cukup besar namun karakter tingkat kritis siswa masih rendah.

## B. Identifikasi Masalah

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam pembelajaran demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam menumbuhkan berpikir kritis siswa mendorong penulis memfokuskan permasalahan dengan member batasan-batasan masalah.

Batasan-batasan masalah itu ditujukan untuk memperjelas permasalahan tersebut, maka masalah pokok peningkatan berpikir kritis siswa tersebut dijabarkan dalam masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perencanaan pembelajaran demokrasi di SMA Pasundan 3 Cimahi?
2. Bagaimana proses pembelajaran demokrasi yang dilakukan di SMA Pasundan 3 Cimahi?
3. Bagaimana proses evaluasi pembelajaran demokrasi yang dilakukan di SMA Pasundan 3 Cimahi?
4. Bagaimana proses pembelajaran demokratis untuk menumbuhkan berpikir kritis siswa di SMA Pasundan 3 Cimahi?

Pertanyaan masalah itu dimaksudkan dalam rangka efektivitas penelitian agar lebih fokus peneliti membatasi permasalahan penelitian pada kegiatan pembelajaran PKn yang terjadi di SMA Pasundan 3 Cimahi yang dilakukan oleh guru terutama pada pembelajaran demokrasi dan sikap siswa dalam kegiatan pembelajaran maupun pada kegiatan ekstrakurikuler dalam berpikir kritis. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu penulis dalam melakukan kegiatan penelitian.

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui proses peerencanaan pembelajaran demokrasi di SMA Pasundan 3 Cimahi
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran demokrasi di SMA Pasundan 3 Cimahi
3. Untuk mengevaluasi pembelajaran demokrasi yang dilakukan di SMA Pasundan 3 Cimahi.

4. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran demokrasi yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA PAsundan 3 Cimahi

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bahan pengembangan keilmuan bagi peneliti sebagai referensi untuk menjawab salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan pada mata pelajaran PKn.
2. Sebagai bahan masukan bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran demokrasi dalam rangka mengembangkan sikap berpikir kritis siswa sebagai alternatif pengembangan kemampuan dan kompetensi siswa serta pengembangan keterampilan siswa dalam mengkritisasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sebagai masukan bagi Jurusan PKn untuk terus meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kewarganegaraan.

## E. Struktur Organisasi Penulisan

Tesis yang nantinya akan dikembangkan terdiri dari 5 bab, yakni: (1) bab pendahuluan, (2) tinjauan pustaka, (3) metodologi penelitian, (4) hasil penelitian dan pembahasan serta (5) kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab pendahuluan secara rinci mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Pada bab selanjutnya tinjauan pustaka berisikan tentang bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, rasional dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan, Tujuan, dan juga

karakteristiknya. Di dalam bab ini juga akan diuraikan tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi, bagaimana strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan serta akan dibahas mengenai Membentuk keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran demokrasi. Di bagian akhir ditutup dengan paradigma penelitian.

Bab berikutnya merupakan metodologi penelitian yang mencakup lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, definisi oprasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analsis data, keabsahan temuan penelitian serta tahap-tahap pelakasanaan penelitian di lapangan. Pada bab selanjutnya yaitu bab tentang hasil dan pembahasan yang mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab terakhir merupakan bab kesimpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap analsis temuan penelitian.